

## **BAB II**

### **HUBUNGAN VIETNAM DENGAN TIONGKOK DAN PANDEMI COVID-**

**19**

#### **2.1. Sejarah Konflik Tiongkok dengan Vietnam**

Sejarah konflik antara Tiongkok dengan Vietnam sudah ada sejak pasca Perang Dunia Kedua, yang terkonsentrasi pada sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, sejarah mencatat hubungan Tiongkok dengan Vietnam sempat memanas kembali akibat intervensi Tiongkok pada perang Kamboja dengan Vietnam tahun 1978-an.

##### **2.1.1. Konflik Kamboja-Vietnam Tahun 1978, Melibatkan Tiongkok**

Tahun 1975, Federasi Indocina meraih kemenangan atas kaum Komunis di wilayah Indocina, hal ini membuat hubungan Kamboja dengan Vietnam memburuk. Sengketa perbatasan mulai terjadi pada tahun 1977, terjadi bentrokan antara tentara Vietnam dengan tentara Kamboja, di perbatasan negara Kamboja yang mana saat itu RRC memihak pada pemerintahan Khmer Merah pimpinan Pol Pot Kamboja (Ndouk, 1981). Sejak kemenangan Kaum Komunis (Khmer Merah) RRC merupakan pelindung dan teman bagi Kamboja dengan mengirimkan bantuan militer dan bantuan ekonomi, sedangkan Vietnam dibantu oleh Uni-Soviet.

Konflik Kamboja-Vietnam bertumbuh menjadi konflik lain antara Tiongkok-Vietnam didasarkan pada sikap tegas Tiongkok yang mendukung kedaulatan pemerintah Phnom Penh di bawah pimpinan PM Pol Pot dan intervensinya di dalam sengketa melawan Vietnam (Ndouk, 1981). Respon Tiongkok terhadap Vietnam ialah memangkas bantuan ekonomi kepada Vietnam

dengan dasar adanya propaganda anti-RRC di Vietnam serta pengusiran orang – orang China dan keturunan dari negara Vietnam. Konflik meluas hingga terjadi bentrokan senjata di perbatasan, propaganda dan saling tuduh antar kedua negara tersebut.

Tahun 1979 Pemerintahan Kamboja jatuh ke tangan pemberontak Kamboja KNUFNS yang sepenuhnya dibantu oleh Vietnam. Tiongkok mengambil tindakan agresif dengan menyerbu wilayah Vietnam sebagai bentuk sikap tegas yang ditunjukkan RRC menolak Federasi Indocina yang mengklaim negara Laos dan Kamboja di bawah proteksi Vietnam, dan sebagai peringatan bagi AS (terkait Kuba yang merupakan kaki tangan Uni-Soviet). Para pengamat Barat menyatakan dalam kurun 30 tahun Tiongkok seolah berperan menjadi “Polisi Asia Tenggara”, baru pertama kalinya menimbulkan korban jiwa.

### **2.1.2. Sengketa LCS antara Tiongkok-Vietnam**

Konflik Laut China Selatan dimulai sejak tahun 1947, yang mana pemerintah Tiongkok pada saat itu mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan yaitu, klaim 90% wilayah Laut China Selatan menjadi bagian dari wilayah negara Tiongkok (Ariansah dkk., 2023). Klaim wilayah ini disampaikan pemerintah Tiongkok kala itu dengan dasar prinsip Sembilan Garis Putus-putus (*Nine Dash Line*) (ICG, 2021). Berbentuk huruf ‘U’, terbentang dari perairan Hainan, hingga sebelah Timur perairan Taiwan. Garis putus – putus bagian Timur dan Barat berbentuk ‘Lidah Sapi’ bertumpuan dengan wilayah perairan Vietnam dan Filipina (Ariansah dkk., 2023). Pemerintah RRC maupun Vietnam sama – sama mengklaim

wilayah Kepulauan Spratley dan Paracel. Bentrokan antara Kapal China dengan Kapal Vietnam seringkali terjadi di kedua Wilayah Tersebut (Ndouk, 1981).

Laut Cina Selatan dalam bahasa Vietnam '*Biyu Yong*' ini membuat Tiongkok berselisih tak hanya dengan Negara Vietnam namun dengan negara – negara di ASEAN lainnya seperti, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Brunei Darussalam (ICG, 2021). Vietnam menjadi negara utama yang berselisih dengan Tiongkok, selain Filipina. Vietnam bersikeras mengklaim wilayah LCS yang diklaim sepihak oleh Tiongkok bertumpu pada tiga pilar: *Pertama*, Vietnam memiliki bukti sejarah yang kuat dan dasar hukum yang cukup untuk mengklaim wilayah. *Kedua*, Vietnam keras menentang penggunaan kekerasan dan mengupayakan solusi damai jangka panjang atas perselisihan sesuai dengan ketentuan UNCLOS. *Ketiga*, Vietnam bekerjasama dengan pihak lain untuk menjaga stabilitas keamanan regional.

Bulan November tahun 1978, pasukan Militer RRC menginvasi Kota Tapal batas di dalam wilayah negara Vietnam, yang mana pasukan RRC berhasil menguasai wilayah perbukitan Trung Khanh Provinsi Cao Lang. Respon invasi RRC dikeluarkan melalui Kementerian Luar Negeri Vietnam yang menuntut untuk RRC untuk segera meninggalkan daerah mereka. Bagi RRC langkah penyerangan dan pengumpulan kekuatan militer RRC di perbatasan Vietnam – Tiongkok, merupakan respon normal atas kedekatan Vietnam dengan Uni-Soviet yang semakin mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini memuncak dengan terjadinya penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerja sama antara Uni-Soviet pada tanggal 3 November 1978 yang berlaku 25 tahun. Isi perjanjian tentang upaya kerja

sama, perluasan hubungan kedua negara, perluasan hubungan ekonomi, ilmu pengetahuan dan meningkatkan bantuan Moskow terhadap Vietnam.

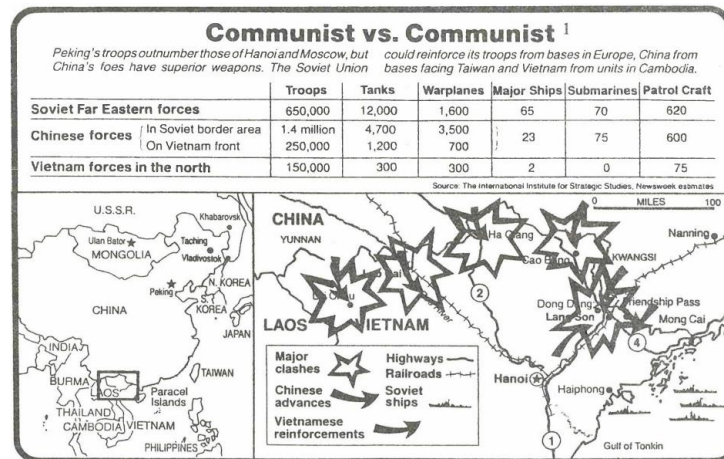
Surat kabar resmi Tiongkok ‘Xinhua’ mengeluarkan pernyataan resmi tanggal 18 Februari 1979 mengenai serangan terhadap Vietnam sebagai “hukuman” terhadap Vietnam karena tak kunjung berhenti melakukan agresi terhadap Kamboja. Dalih yang disampaikan Pemerintah RRC “kami tidak seincipun menginginkan Wilayah Vietnam. Setelah memukul mundur pasukan pasukan agresor Vietnam ke wilayah yang ditetapkan, Pasukan RRC akan mundur kembali ke wilayah mereka”. Selain itu, alasan lainnya Pasukan RRC wilayah Guangxi dan Yunnan melakukan serangan, karena daerah mereka diserang oleh Pasukan Vietnam. Pemerintah Tiongkok, melalui surat Kabar Xinhua menyatakan siap untuk membuka jalur diplomasi langkah-langkah konstruktif antara RRC dengan Vietnam.

Pemerintah RRC tegas menyatakan, serangnya kepada Vietnam setelah lima tujuan utama RRC tercapai yaitu, 1) Memaksa Vietnam untuk menarik pasukannya dari wilayah Laos dan Kamboja, dan membiarkan kedua negara tersebut membentuk kekuatan secara internal (kaum nasionalis); 2) Pesan tersirat kepada Pemerintah Dunia untuk tidak main – main terhadap RRC; 3) Menunjukkan kepada AS dan Eropa bahwa Tiongkok tidak akan menyerah melawan Uni-Soviet, 4) Menghancurkan infrastruktur militer Vietnam di daerah dekat Provinsi Guangxi dan Yunnan; dan 5) Melemahkan kekuatan militer Vietnam.

Pihak Vietnam telah menyiapkan pasukannya di bagian Utara, sementara Tiongkok telah menyiagakan 17 divisi pasukan Tiongkok diperbukitan (sekitar

225.000 pasukan) dan 75.000 – 85.000 pasukan telah berada di wilayah Vietnam.

Berikut peta persebaran Serangan Tiongkok terhadap Vietnam:



**Gambar 1. Peta Serangan Tiongkok ke Vietnam**

Sumber: Ndouk (1981)

Resolusi Dewan keamanan PBB pada DK-PBB tanggal 23 Februari 1979 disambut baik oleh Wakil PM RRC Deng Xiaoping yang berisi tuntutan kepada Tiongkok untuk segera menarik mundur pasukan Cina di Vietnam dan kepada Vietnam untuk segera menarik mundur pasukannya dari Kamboja. Usulan Dewan Keamanan PBB tersebut diajukan oleh AS, Norwegia, Portugal dan Jepang yang kemudian didukung oleh Inggris dan Perancis. Namun, Dewan Keamanan PBB tidak mencapai kesepakatan bulat dan menunda sidang dua kali, karena kompleksitas permasalahan di wilayah Indocina tersebut. Uni-Soviet mengajukan Veto pada tanggal 16 Maret 1979, dengan isi seruan kepada pihak – pihak asing segera meninggalkan Wilayah Indocina, berdasarkan usulan negara di ASEAN (Ndouk, 1981). Tanggal 27 Februari 1979, Pihak Beijing menyatakan bersedia menghentikan agresinya kepada Vietnam apabila mereka bersedia untuk membuka jalur diplomasi. Namun hasutan dari Uni-Soviet kepada Vietnam membuat

pernyataan tersebut tidak digubris oleh Vietnam. Respon Vietnam dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1979, Vietnam menolak ajakan runding dari Tiongkok dan menyatakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pasukan RRC meninggalkan wilayah Vietnam.

Tanggal 5 Maret 1979, Pihak RRC mengkonfirmasi akan mulai melakukan penarikan pasukannya, setelah berhasil menjatuhkan Kota strategis Lang Son 130 km timur laut Hanoi. Dalam proses penarikan pasukan, Pihak RRC memberi peringatan akan melakukan serangan balasan apabila mendapatkan serangan kembali dari Vietnam, dan Pihak RRC memberikan pesan kepada dunia untuk meminta Vietnam segera menarik pasukannya dari Kamboja.

Tahun 1988, Vietnam dengan Tiongkok terlibat Perang Terbuka yang mengakibatkan gugurnya 70 tentara Vietnam (Roza, 2013). Tahun 1999, sebanyak 700 Tentara Vietnam disiagakan di wilayah LCS. Tahun 2005, Pasukan keamanan laut Tiongkok menembak Nelayan Vietnam karena dianggap melanggar Batas Wilayah Tiongkok (Roza, 2013). Peristiwa penembakan kembali terjadi tahun 2013, dimana nelayan yang sedang berada di perairan Kep. Parcel ditembak dan terbunuh oleh pasukan Tiongkok. Tiongkok menanggapi dengan serius Vietnam sebagai agresor utama terkait konflik LCS.

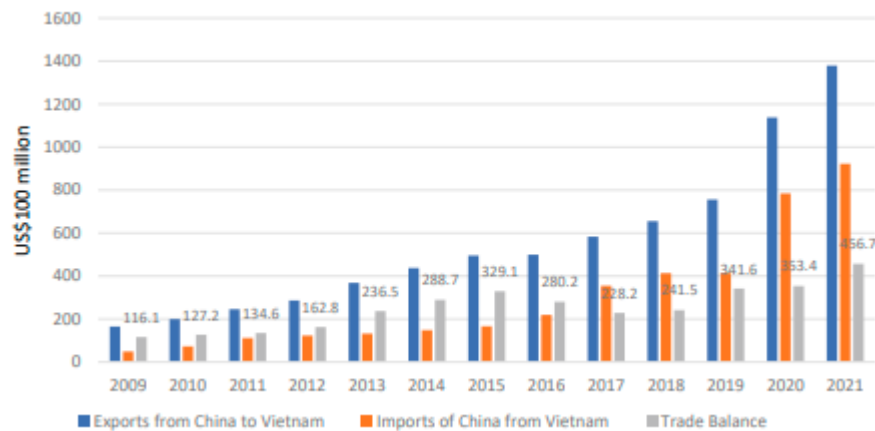
## **2.2. Hubungan Tiongkok dengan Vietnam di Luar Pandemi Covid-19**

Vietnam merupakan negara tetangga terbesar bagi Tiongkok di Kawasan ASEAN, sehingga dalam faktor kebudayaan Vietnam banyak dipengaruhi oleh Tiongkok (Yu, 2024). Sejak perubahan kebijakan Vietnam “invasi dan transparansi” yang dilakukan tahun 1986, Vietnam mulai membuka dirinya bagi

negara luar termasuk Tiongkok untuk melakukan kerjasama strategis dan transaksi bisnis dan perdagangan. Pada tahun 2008, ketika krisis keuangan global, Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling sukses dalam hal kinerja ekonominya, alhasil menarik para pemodal asing untuk berinvestasi di negara Vietnam. Hubungan Tiongkok-Vietnam pada sub-bab ini membahas tentang Hubungan ekonomi Tiongkok-Vietnam; *The Belt and Road Initiative* di Vietnam; Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok pada Vietnam; dan Perkembangan Industri Elektronik Vietnam. Penjabaran Sub-bab Hubungan Tiongkok-Vietnam ini dapat memberikan gambaran pentingnya hubungan Vietnam – Tiongkok dan sebaliknya.

### **2.2.1. Hubungan Ekonomi Tiongkok-Vietnam**

Tiongkok memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan infrastruktur, logistik dan tenaga ahli yang berkualitas bagi Vietnam. Sejak tahun 2004, Tiongkok menjadi ‘Mitra Dagang Terbesar’ bagi Vietnam. Bahkan Vietnam mengalahkan Malaysia sebagai mitra dagang strategis Tiongkok dan menjadi Mitra Dagang terbesar ke-delapan bagi Tiongkok di dunia. Volume transaksi perdagangan Tiongkok-Vietnam tahun 2009 US\$ 21,4 Miliar meningkat 10 kali lipat pada tahun 2021 menjadi US\$ 230,1 Miliar.



**Gambar 2. Transaksi Perdagangan Bilateral Tiongkok-Vietnam dari tahun 2009 – 2021**

Sumber : Yu (2024)

Vietnam menjadi incaran utama investasi perusahaan Luar Negeri Tiongkok, dengan stok investasi langsung Tiongkok ke Vietnam US\$2,21 Miliar tahun 2021, merupakan sumber investasi asing terbesar keempat di Vietnam.

### **2.2.2. The Belt and Road Initiative bagi Vietnam**

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Vietnam menyadari kebutuhannya terhadap investasi Tiongkok. BRI merupakan salah satu alat efektif yang dapat dimanfaatkan Vietnam untuk memperbesar kapasitas perdagangan asing, investasi asing dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dari sektor Infrastruktur Vietnam masih sangat membutuhkan pembangunan dalam negeri yang mana hal tersebut dapat diakomodir dengan baik oleh Tiongkok. Maka dari itu, sejak tahun 2017, Vietnam menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kerjasama strategis BRI (Yu, 2024). Pada November 2015, Presiden Xi Jinping menandatangani MoU kolaborasi pembangunan dua koridor, satu sabuk



antara Vietnam dengan Tiongkok. Dari sisi Tiongkok, Vietnam merupakan titik penting promosi *China's Belt and Road Initiative*.

### **2.2.3. Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok pada Vietnam**

Perang Dagang AS-Tiongkok mengakibatkan tingginya Penetapan tarif tinggi pada impor Tiongkok. Sehingga banyak dari perusahaan Internasional Tiongkok ataupun perusahaan nasional menghindari tarif pada produk mereka (Yu, 2024). Dalam rangka menghindari tarif yang tinggi tersebut, banyak dari perusahaan Tiongkok yang memutuskan untuk memindahkan produksi mereka ke negara dengan biaya tarif rendah, salah satu tujuan utamanya ialah negara Vietnam. Berdasarkan pantauan Dana Moneter Internasional, apabila Amerika Serikat memberlakukan 25% tarif untuk seluruh produk ekspor Tiongkok, maka Vietnam lah negara yang paling diuntungkan sebagai negara penyedia ekspor produk Tiongkok ke Amerika Serikat. Diketahui Vietnam merupakan negara peringkat ke-12 sumber utama impor Amerika Serikat, dengan volume perdagangan bilateral AS-Vietnam US\$89,6 Miliar (Yu, 2024).

### **2.2.4. Perkembangan Industri elektronik Vietnam**

Sejak bergabungnya Vietnam ke dalam kelompok Organisasi Perdagangan Dunia tahun 2007, Vietnam terus mengembangkan rantai industri regional dan globalnya. Vietnam saat ini merupakan eksportir ketiga terbesar produk elektronik di ASEAN (Yu, 2024). Para pelaku investasi perusahaan asing di Vietnam sangat diuntungkan dengan program bebas pajak khusus atau tarif pajak rendah yang diterapkan pemerintah Vietnam (Yu, 2024). Namun, dibandingkan sektor lain,

produk elektronik memiliki laju pertumbuhan yang relatif lambat. Hal ini disebabkan oleh tingkat partisipasi yang rendah dalam rantai industri global dan rendahnya intraksi dan kerjasama asing dalam produk elektronik di Vietnam.

### **2.3. Produksi Vaksin Tiongkok Selama Pandemi COVID – 19**

Pemerintah Tiongkok dengan sigap memberikan dana, kelembagaan, dan infrastruktur yang dibutuhkan perusahaan pembuat Vaksin seperti Sinopharm, CanSino dan Sinovac, agar segera dapat didistribusikan (Yew, 2023). Program pengembangan Vaksin di Tiongkok dimulai sejak Bulan Januari 2020 hingga pada Bulan April 2020, ketiga Vaksin di atas memasuki uji klinis.

Perhatian pemerintah Tiongkok terhadap industri Vaksin tidak hanya saat adanya tragedi Pandemi saja, namun sejak tahun 1949, pemerintah gencar untuk melakukan pengembangan dan penelitian guna memperbaiki industri Vaksin termasuk mengkampanyekan gerakan *National Immunization Program* (NIP) (Wang & Shao, 2021). Vaksin merupakan produk biologis sebagai langkah preventif untuk imunisasi dengan tujuan pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit (Wang & Shao, 2021). Beberapa keberhasilan pemerintah Tiongkok dan Industri vaksin antara lain, pengendalian penyakit Hepatitis B, Campak, Pertusis, Ensefalitis, dan penyakit lainnya. Tahun 2019 sebelum wabah Covid-19 merebak, NMPA (*national Medical Products Administration*) membuat *scientific action plan* untuk drug supervision, yang kemudian hal ini membantu pengembangan industri Vaksin yang berguna saat Pandemic Covid-19 merebak (Wang & Shao, 2021). Sehingga pada Tahun 2020, saat Pandemi merebak, Industri Vaksin di Tiongkok

telah memiliki teknologi yang mumpuni, variasi, skala untuk penelitian dan pembuatan vaksin Covid-19.

Terdapat delapan jenis Vaksin yang disetujui untuk peredaran (Covid-19-Vaccine Tracker, 2024) yaitu, 1) Anhui Zhifei Longcom (Zifivax) disetujui oleh Indonesia, Tiongkok, Colombia, dan Uzbekistan; 2) Livzon Mabpharm Inc (V-01) disetujui di Tiongkok; 3) Cansino (Convidecia) disetujui di Argentina, Indonesia, Malaysia, Mexico, Tiongkok, Chile, Ecuador, Hungary, Republic of Moldova dan Pakistan; 4) Shenzen Kangtai Biological Products Co (KCONVAC) disetujui di Tiongkok dan Indonesia; 5) Sinopharm Beijing (Covilo) disetujui di 93 negara seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand dan 90 negara lainnya; 6) Sinopharm Wuhan Inactivated (Vero Cells) disetujui di 2 negara yaitu Tiongkok dan Philippines; 7) CanSino (Convidecia Air) disetujui di 2 negara yaitu, Tiongkok dan Morocco; dan 8) Sinovac (CoronaVac) disetujui di 56 Negara seperti Indonesia, Azerbaijan, Benin dan 53 negara lainnya.

#### **2.4. *Nation Branding* Tiongkok Memburuk Akibat Pandemi Covid-19**

Selama masa pandemi Covid-19, terjadi peningkatan dramatis dalam stereotipe negatif terhadap Tiongkok. Stereotipe dan sentimen ini menyebar melalui platform sosial seperti Twitter, berita, surat kabar hingga media sosial lainnya. Media sosial, dalam hal ini Twitter, tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk memperoleh dan menyebarkan informasi daring, tetapi juga menjadi alat diplomasi yang semakin penting. Sehingga cuitan akun seorang pemimpin dunia atau pemimpin negara atau bahkan tokoh bisnis dapat menggerakkan massa dalam kapasitas jutaan.

Akun Twitter pribadi Donald Trump yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat menimbulkan dampak negatif bagi tersebarnya sentimen negatif terhadap Tiongkok ataupun masyarakat Tiongkok yang ada di Amerika Serikat. Diketahui Donald Trump melakukan 47 cuitan dengan nada sentimen anti-Tiongkok, terutama dengan kata kunci pencarian seperti Tiongkok Virus atau *Chinese Viruses*. Situs *National Geographic* mencatat bahwa dalam beberapa bulan awal pandemi, ribuan warga Asia-Amerika menjadi sasaran pelecehan dan penyerangan, dengan Presiden Trump secara berulang menyebut Covid-19 sebagai Tiongkok virus, menyalahkan Tiongkok atas penyebaran wabah tersebut. Bahkan, survei IPSOS pada bulan April 2020 menunjukkan bahwa tiga dari sepuluh warga Amerika menyalahkan Tiongkok atau orang Tiongkok atas virus tersebut. Bisnis dan properti keturunan Asia mengalami kerusakan yang signifikan akibat tanda-tanda rasisme. Warga keturunan Asia juga menghadapi kekerasan fisik dan verbal, mencapai 100 kasus per hari di California saja. Hingga Agustus 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap warga keturunan Asia di seluruh negara bagian mencapai 2.600 kasus.

Selain dari sentimen negatif yang mengarah langsung antara Tiongkok dengan menjadi negara penyebab penyebaran Covid-19, ternyata isu menyebar kepada hal – hal lain di luar Pandemi Covid-19. Seperti mencuatnya kembali isu internal Tiongkok yang telah lama menjadi perhatian dunia. Permasalahan hak asasi manusia di Xinjiang, terutama terhadap etnis Uyghur, menjadi sorotan tajam di tengah pandemi. Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan massal dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap kelompok etnis

tertentu, semakin merugikan citra Tiongkok di mata masyarakat internasional. Selain itu, masalah kemerdekaan Hong Kong dan ketegangan dengan Taiwan semakin menyulitkan posisi Tiongkok di tataran global.

Sentimen anti-Tiongkok yang telah ada selama beberapa dekade kembali meningkat akibat pandemi Covid-19. Sejumlah tokoh, termasuk anggota Kongres Arizona, Paul Gosar, dan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, memicu peningkatan ini dengan menggunakan istilah yang merendahkan seperti "Wuhan virus" dan "Tiongkok virus." Meskipun WHO (2020a) mencoba untuk menghentikan penggunaan sebutan tersebut karena dapat menimbulkan stigma, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaannya di media sosial dan berita. Penggunaan istilah "Chinese virus" meningkat sebanyak 650 persen di Twitter dan 800 persen di berbagai media, terutama di saluran berita dan media sosial. Presiden Trump juga turut memanfaatkan platform media sosial untuk menyuarakan pandangannya dengan menggunakan istilah yang merendahkan Tiongkok terkait pandemi. Tidak hanya di Amerika, tetapi kebencian terhadap COVID-19 juga meluas ke beberapa negara seperti Australia, India, dan Inggris.

Analisis menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 10.000 tweet yang menggunakan istilah "kung-flu," dan media sosial seperti TikTok juga turut menjadi wadah bagi pemakaian istilah merendahkan dengan tagar #chinese\_coronavirus. Instagram (milik Facebook) juga tercatat memiliki 72.000 post dengan tagar #WuhanVirus dan 10.000 post dengan tagar #KungFlu. Tidak hanya dibatasi pada media sosial, namun kebencian ini juga merasuki kehidupan sehari-hari. Bisnis dan properti milik keturunan Asia menjadi target serangan

rasisme, dengan ribuan kasus kekerasan fisik dan verbal dilaporkan. Meskipun platform-media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menyatakan akan mengawasi dan menghapus akun yang mengandung muatan rasisme, namun belum ada laporan pasti mengenai jumlah akun yang benar-benar dihapus.

Sebuah survei yang dirilis oleh Pew Research Center Tahun 2021 terhadap Tiongkok dan beberapa negara barat mengenai penanganan penyebaran Covid-19 menyatakan bahwa terdapat peningkatan persepsi negatif terhadap Tiongkok karena dianggap menjadi penyebab awal kemunculan Covid-19. Negara-negara seperti Australia, Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Kanada, Belanda, Korea Selatan, Swedia, Italia, Denmark hingga Jepang menurut survei lebih dari 60% penduduknya memandang Tiongkok secara negatif. South Tiongkok Morning Post, juga menambahkan bahwa semakin buruknya citra Tiongkok karena isu Covid-19 merupakan keberlanjutan dari pendekatan diplomatik yang agresif terhadap komunitas internasional. Selain itu, diberbagai negara aksi rasisme terhadap etnis China atau Sinofobia menjadi marak, mulai dari *verbal abuse* hingga *physical abuse* (Kochhar, 2021).

Respon masyarakat Eropa terhadap munculnya Covid-19 dan bagaimana Tiongkok memiliki korelasi yang kuat terhadap merebaknya virus itu telah membawa citra dan kebijakan luar negeri Tiongkok menuju babak baru. Dilihat dari berita utama media dan lembaga think tank selama setahun terakhir, gambarannya terlihat cukup jelas: dengan serangkaian laporan dan analisis berita termasuk, “Bagaimana Pandemi Virus Corona Menghancurkan Ilusi Eropa Tiongkok” (Corre & Brattberg, 2020), “Bagaimana pandangan Eropa terhadap Tiongkok semakin

mengeras setelah adanya Covid-19”(Vock 2020), “Tiongkok, yang mencari teman di Eropa, mendapati kemarahan yang meningkat dan frustrasi” (Myers, 2021), dan “Bagaimana Eropa semakin waspada terhadap Beijing” (Grajewski, 2020).

Pendapat negatif terhadap Tiongkok di antara negara-negara Eropa Barat yang disurvei telah mencapai tingkat tertinggi di Swedia (85 persen), yang masih terlibat dalam pertikaian diplomatik jangka panjang dengan Beijing mengenai hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Yang lebih dramatis lagi adalah pandangan negatif Presiden Xi, yang kepemimpinannya yang keras kepala dan tindakan keras yang tiada henti terhadap hak-hak sipil di Hong Kong dan Xinjiang tampaknya telah mengasingkan masyarakat di negara-negara demokrasi liberal: peringkat “Tidak percaya” untuk Xi berkisar antara 70 persen di negara-negara demokrasi liberal. Belanda menjadi 82 persen di Denmark dan Swedia, melonjak antara 9 dan 21 poin persentase dalam satu tahun.

Penelitian yang bertajuk “Opini publik Eropa tentang Tiongkok di era COVID-19” yang dibuat oleh Richard Turcsányi dkk. (2020), di Central European Institute of Asian Studies (CEIAS) mengumpulkan data dari lima negara anggota UE di Eropa Barat dan lima negara Eropa Tengah dan Timur, ditambah Inggris, Serbia, dan Rusia pada musim gugur tahun 2020. Meskipun perasaan terhadap Tiongkok tidak terlalu negatif di negara-negara Visegrád lainnya, perlu dicatat bahwa “kepercayaan” terhadap Tiongkok jauh lebih rendah dibandingkan dengan kepercayaan terhadap Amerika Serikat dan khususnya terhadap UE secara keseluruhan. Misalnya, masyarakat Hongaria lebih percaya pada Eropa dan

Amerika dibandingkan sekutu favorit perdana menteri mereka, yaitu Beijing dan Moskow.

Menurut data yang diperoleh dari Stop AAPI Hate, organisasi yang mencatat insiden-insiden diskriminasi, kebencian dan Xenofobia terhadap Asia Amerika dan orang Kepulauan Pasifik di Amerika Serikat, melaporkan bahwa pada dua bulan pertama pada tahun 2020, angka diskriminasi menggunakan pelecehan verbal dan kekerasan fisik meningkat secara signifikan mencapai 3.795 yang sebagian besar didominasi oleh pelecehan verbal (Widodo, 2021). Bahkan terdapat beberapa kasus yang dilatarbelakangi oleh motivasi rasial yang berujung pada pembunuhan, seperti yang terjadi di Atlanta dan San Francisco. Serangkaian kejadian serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa, diskriminasi keturunan Cina di Eropa mengalami peningkatan secara signifikan, hal tersebut tentunya berdampak pada pekerja dan usaha keturunan China karena dianggap sebagai penyebab utama menyebarnya Covid-19 ke negara mereka.

Gill (2020) dalam *The Washington Quarterly*, berpendapat bahwa dengan kemampuan pendanaan dan ekonomi yang besar, tentunya Tiongkok memiliki kemampuan bargaining yang kuat namun pandemi Covid-19 membuat pengaruh Tiongkok mengalami penyusutan akibat berbagai kebijakan dan pembatasan dari negara-negara di dunia. Oleh karena itu, Tiongkok perlu melakukan perbaikan *Soft Power Diplomacy*-nya meskipun disisi lain, Amerika Serikat juga mengalami fenomena yang sama (Gill, 2020). Salah satu langkah efektif Tiongkok yang dapat diambil dalam jangka waktu yang singkat adalah dengan memanfaatkan pemberian penawaran pasokan vaksin yang tingkat produksinya masih terbatas kepada negara-



negara yang mau menerimanya. Upaya Tiongkok tersebut kemudian diidentifikasi sebagai diplomasi vaksin, serupa dengan pernyataan dari Yanzhong Huang, Senior Fellow for Global Health, yang mengatakan bahwa diplomasi vaksin merupakan upaya Tiongkok untuk memperbaiki citra negatifnya (CNN Indonesia, 2020).

## **2.5. Survei pendapat Masyarakat Vietnam terhadap Vaksin Tiongkok**

Survei pendapat yang dilakukan kepada masyarakat Vietnam terkait dengan Vaksin Tiongkok dilakukan oleh van Dijk dan Lo (2023). Diketahui secara keseluruhan, distribusi vaksin Tiongkok di kawasan ASEAN sebanyak 536,1 Milion Dosis, dengan Vietnam sebanyak 41,5 Milion dosis. Penelitian van Dijk dan Lo (2023) menguraikan tentang pendapat masyarakat Vietnam terkait dengan kontribusi Tiongkok dengan diplomasi vaksin yang dilakukan. Diketahui berdasarkan temuan Demongeot (dalam van Dijk & Lo, 2023), Vietnam diketahui merupakan negara ASEAN terakhir yang membeli Vaksin Tiongkok. Hasil temuan studi van Dijk dan Lo (2023) menunjukkan sentimen anti-Tiongkok mengakar kuat di masyarakat Vietnam. Hal ini berkaitan dengan sejarah konflik yang dilalui kedua negara yang sama – sama keras terkait sengketa LCS. Sikap ketidaksukaan masyarakat Vietnam terhadap Tiongkok ini diekspresikan dalam penolakan produk-produk Tiongkok. Stigma negatif ini menjalar hingga ke respon negatif yang ditunjukkan masyarakat Vietnam berkaitan dengan upaya diplomasi vaksin yang dilakukan Tiongkok. Keraguan akan keamanan dan keefektifan vaksin Tiongkok menjadi alasan utama ketidaksetujuan masyarakat Vietnam terhadap Vaksin Tiongkok.

Temuan peneliti selanjutnya didasarkan pada laporan “*The State of Southeast Asia 2022*” yang dilakukan oleh ISEAS-Yusof Institute (2022) Survei menunjukkan 90% masyarakat Vietnam khawatir tentang pengaruh perekonomian Tiongkok, 97,7% mengkhawatirkan pengaruh politik Tiongkok terhadap Vietnam. Lebih lanjut, masyarakat mempertanyakan dan mengkhawatirkan kemanjuran vaksin Tiongkok, hanya 4,2% yang memilih Sinopharm/ Sinovac (ISEAS-Yusof Institute, 2022). Muncul desakan dari masyarakat Vietnam kepada pemerintah untuk menyebarkan propaganda ‘Vaksin terbaik adalah yang pertama: Dapatkan Vaksinasi saat tiba giliran anda’. Studi ISEAS tentang “*What Could potentially worsen your positive impression of China?*”, berikut hasil Survei:

**Tabel 1. Survei Perbandingan Daya tarik Tiongkok terhadap Masyarakat ASEAN dan Khusus Vietnam**

Negara	China menggunakan Daya tarik Pariwisata dan ekonomi untuk menghukum pilihan kebijakan luar negeri saya		Strategi Tangan Besi Tiongkok di Laut China Selatan		Pertumbuhan Pengaruh Dominasi Politik dan Ekonomi Tiongkok di Negara saya		Intervensi Tiongkok dalam urusan Domestik Negara saya (termasuk urusan masyarakat Etnik Tiongkok di negara saya)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
ASEAN	34,2%	38,8%	45,6%	46,2%	52,5%	50,7%	23,9%	37,9%
Vietnam	40,7%	28,9%	74,1%	55,3%	37%	50%	11,1%	31,6%

Sumber: ISEAS-Yusof Institute (2022)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat beberapa temuan yang menarik yaitu:

- 1) Adanya pergerakan persepsi Masyarakat Vietnam terhadap daya tarik Tiongkok berupa penurunan persepsi bahwa Tiongkok menghukum pilihan kebijakan luar negeri menggunakan Ekonomi dan Pariwisata; 2) Masyarakat Vietnam sadar dengan meningkatnya dominasi pengaruh Politik dan Ekonomi Tiongkok terhadap negaranya; 3) Konflik LCS masih menjadi titik panas Tiongkok baik di ASEAN maupun Vietnam; dan 4) Kesadaran masyarakat Vietnam terhadap intervensi

Tiongkok dalam beberapa urusan domestik negara mereka, terutama jika berkaitan dengan masyarakat Etnis Tiongkok. Persentase antara memilih Vaksin Tiongkok dengan Vaksin Amerika Serikat yaitu, tahun 2021 sebesar 29,7% memilih Amerika Serikat dan 13,7% memilih Tiongkok. Tahun 2022, sebesar 52,8% memilih Tiongkok dan 16% memilih Tiongkok. Masyarakat Vietnam mengkhawatirkan pendekatan Tiongkok sebagai “*China’s strong-arm tactics in the SCS and the Mekong*” (ISEAS-Yusof Institute, 2022).

Berdasarkan laporan Nikkei Asia (ANI, 2021), adanya sikap penghindaran Vietnam terhadap produk vaksin Tiongkok dan lebih memilih vaksin AstraZeneca (Inggris-Swedia). Dien Luong, peneliti di ISEAS-Yusif Institute menjelaskan rendahnya minat Hanoi akan Vaksin Tiongkok tidak hanya dipengaruhi oleh objektifitas vaksin saja namun juga sebagai sikap terhadap konflik LCS. Berdasarkan Laporan Nikkei Asia ini pun selaras dengan Studi van Dijk dan Lo (2023) yang menyatakan diplomasi vaksin yang dilancarkan Tiongkok di Vietnam gagal.